

BAB II

GAMBARAN UMUM

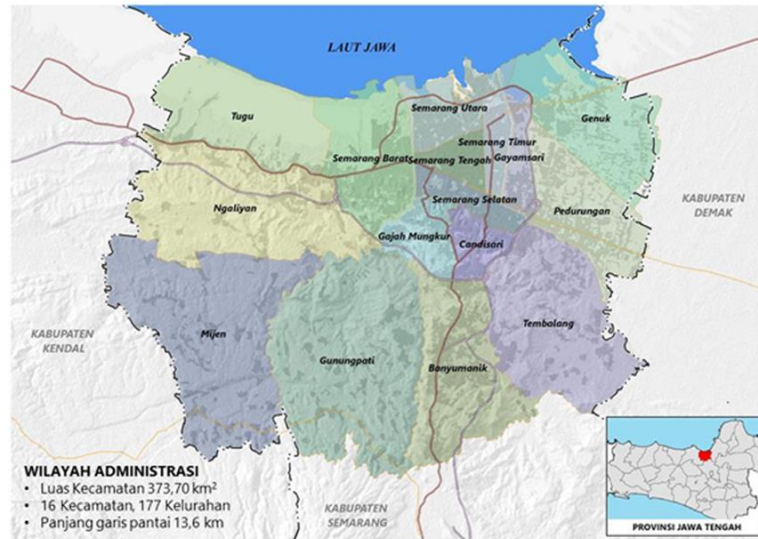
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Aspek Geografi dan Administrasi Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki posisi strategis di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya garis 60 50' - 70 10' LS dan 1090 35' - 1100 50' BT. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang berfungsi sebagai pusat pemerintahan serta menjadi salah satu pusat perekonomian di Jawa Tengah. Hal tersebut didukung oleh lokasinya yang ada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Adapun luas Kota Semarang yakni 373,70 km² yang mencakup sekitar 1,15% dari total luas daratan di Provinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	: Kabupaten Demak
Sebelah Selatan	: Kabupaten Semarang
Sebelah Utara	: Laut Jawa

Gambar 2. 1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang



Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

Secara administrasi, Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan serta 177 Kelurahan.

Adapun luas wilayah dari masing-masing kecamatan, yakni:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,20
8	Pedurungan	12	20,72
9	Genuk	13	27,39
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,70
12	Semarang Utara	9	10,97
13	Semarang Tengah	15	6,14
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
	TOTAL	177	373,70

Sumber: BPS Kota Semarang, 2021

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kota Semarang selalu mengalami pertumbuhan antara tahun 2016 hingga 2020. Hal tersebut terlihat dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan yang mencapai 0,69%. Di sisi lain, kepadatan penduduk sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018, tetapi dalam tiga tahun terakhir tetap relatif stabil di angka 0,582%. Meskipun begitu, Kota Semarang masih menjadi daerah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Semarang mencatat

jumlah penduduk sebesar 1.685.909 jiwa pada tahun 2020 dan kepadatan yang mencapai 4.511 jiwa/km². Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebanyak 11.551 orang yang berada di 16 kecamatan. Data jumlah, persebaran, dan kepadatan penduduk di Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Kepadatan Penduduk Tahun 2020 (Jiwa/Km2)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Semarang Tengah	62,639	61,358	61,073	62,854	61,011	9.937
2	Semarang Barat	160,004	160,483	159,018	157,348	157,434	7.242
3	Semarang Utara	125,956	125,133	125,795	130,434	124,304	11.331
4	Semarang Timur	75,473	73,993	73,491	72,433	72,263	9.385
5	Gayamsari	74,158	73,582	73,954	73,716	73,554	11.902
6	Gajah Mungkur	60,080	60,509	60,146	59,591	59,156	6.522
7	Genuk	108,533	109,578	114,252	115,058	119,716	4.371
8	Pedurungan	187,938	191,039	192,798	192,424	195,589	9.440
9	Candisari	81,367	81,237	80,490	79,385	79,567	12.166
10	Banyumanik	136,866	139,826	139,927	140,419	142,303	5.539
11	Gunungpati	89,809	91,279	93,866	94,347	96,277	1.779
12	Tembalang	171,993	175,845	178,830	180,500	184,807	4.181
13	Tugu	32,873	32,839	33,466	33,308	34,034	1.071
14	Ngaliyan	136,791	137,249	138,618	139,338	141,094	3.714
15	Mijen	68,042	70,413	73,479	74,696	76,793	1.334
16	Semarang Selatan	75,757	74,189	69,375	68,507	68,007	11.468
Jumlah Penduduk		1.648.279	1.658.552	1.668.578	1.674.358	1.685.909	
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		1,14 %	0,588%	0,582%	0,582%	0,582%	
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)		4.410	4.438	4.465	4.480	4.511	

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Semarang, 2021

Berdasarkan data yang tersedia, Kecamatan Pedurungan dengan luas wilayah 20,72 km² tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang pada tahun 2020, yakni mencapai 195.589 jiwa. Sementara itu,

Kecamatan Candisari yang memiliki luas 6,54 km² dan populasi 79.567 jiwa memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.166 jiwa per km². Kecamatan yang berada pada pusat kota atau bagian bawah wilayah Semarang cenderung lebih padat penduduk karena wilayah tersebut menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan utama. Akan tetapi, Kecamatan Banyumanik, Gunungpati, dan Mijen juga memiliki potensi mengalami pertumbuhan, baik dari segi jumlah maupun kepadatan penduduk seiring dengan perkembangan wilayah yang didorong oleh pembangunan, serta pengembangan kawasan perumahan dan pendidikan.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Pedurungan

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kecamatan Pedurungan



Sumber : <https://kecpedurungan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk>

2.2.1 Aspek Geografis Kecamatan Pedurungan

Kecamatan Pedurungan terletak pada wilayah administratif Kota Semarang.

Kecamatan Pedurungan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Genuk

Sebelah Selatan : Kecamatan Tembalang

Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari

Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Permukaan tanah wilayah ini seluruhnya datar. Kecamatan Pedurungan mempunyai ketinggian sekitar 4-7 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini berlokasi sekitar 8 kilometer dari pusat Kota Semarang serta 6 kilometer dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas sekitar ± 2.072 hektar, Kecamatan Pedurungan terbagi menjadi 12 kelurahan serta terdiri dari 160 RW dan 1.203 RT.

2.2.2 Penduduk Kecamatan

a. Jumlah Penduduk

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Per Kelurahan Tahun 2022

Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Gemah	7.908	7.982	15.890
Pedurungan Kidul	7.357	7.441	14.798
Plamongan Sari	7.383	7.446	14.829
Penggaron Kidul	3.895	3.825	7.720
Pedurungan Lor	5.005	5.057	10.062
Tlogomulyo	8.337	8.341	16.678
Pedurungan Tengah	8.064	8.425	16.489
Palebon	7.357	7.625	14.982
Kalicari	4.813	4.891	9.704
Tlogosari Kulon	15.985	16.620	32.605
Tlogosari Wetan	4.786	4.773	9.559
Muktiharjo Kidul	16.778	17.031	33.809
Total	97.668	99.457	197.125

Sumber : Kecamatan Pedurungan dalam Angka, 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kecamatan Pedurungan yaitu sebesar 197.125 jiwa yang terbagi dalam 12 kelurahan. Adapun jumlah penduduk terbanyak berada di Kelurahan Muktiharjo Kidul yakni 33.809 jiwa, yang terdiri dari 16.778 pria dan 17.031 wanita. Sedangkan kelurahan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kelurahan Penggaron Kidul yakni 7.720 jiwa yang terdiri dari 3.895 pria dan 3.825 wanita. Jumlah penduduk wanita di Kecamatan Pedurungan berjumlah 99.457 jiwa dan lebih banyak dibandingkan pria yang hanya berjumlah 97.668 jiwa.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

a. Pendidikan

Tabel 2. 4 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pedurungan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah
Taman Kanak-Kanak (TK)	77
Raudatul Athfal (RA)	14
Sekolah Dasar	49
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	14
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	16
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	7
Sekolah Menengah Atas (SMA)	6
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	6
Madrasah Aliyah (MA)	5

Sumber : Kecamatan Pedurungan dalam Angka, 2023

Pada tahun 2022, Kecamatan Pedurungan memiliki 194 fasilitas pendidikan negeri maupun swasta yang terbagi kedalam 9 tingkatan pendidikan, mulai dari jenjang TK/RA hingga jenjang SMA/MA/SMK. Jumlah sekolah yang terbanyak di Kecamatan Pedurungan yaitu jenjang TK/RA berjumlah 91 sekolah, SD/MI yakni 63 Sekolah, SMP/MTs 23 Sekolah, dan SMA/MA/SMK berjumlah 17 Sekolah.

b. Kesehatan

Tabel 2. 5 Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan dan Kelurahan di Kecamatan Pedurungan Tahun 2022

Kelurahan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	Apotek
Gemah	1	-	8	-	-	4
Pedurungan Kidul	-	-	3	-	-	4
Plamongan Sari	1	-	-	-	-	3
Penggaron Kidul	-	-	1	-	-	1
Pedurungan Lor	-	-	1	-	-	3
Tlogomulyo	-	-	-	-	-	3
Pedurungan Tengah	-	-	2	-	-	6
Palebon	-	-	1	-	1	4
Kalicari	-	-	5	-	-	8
Tlogosari Kulon	-	-	10	1	-	14
Tlogosari Wetan	-	-	1	-	-	3
Muktiharjo Kidul	-	-	1	-	-	3
Total	2	0	33	1	1	56

Sumber : Kecamatan Pedurungan dalam Angka, 2023

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pendukung yang penting untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah dalam membantu memenuhi kebutuhan terkait pelayanan kesehatan. Dari 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan, 2 diantaranya mempunyai fasilitas rumah sakit, 10 kelurahan mempunyai fasilitas poliklinik atau

balai pengobatan, 1 kelurahan memiliki fasilitas puskesmas dengan rawat inap, 1 kelurahan tidak memiliki fasilitas puskesmas dengan rawat inap, dan terdapat fasilitas apotek di seluruh kelurahan. Akan tetapi, tidak tersedia fasilitas rumah sakit bersalin di Kecamatan pedurungan.

2.3 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

2.3.1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

a. Kedudukan

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, Disdalduk KB berperan sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas walikota. Disdalduk KB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah naungan serta bertanggung jawab langsung terhadap Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, Disdalduk KB bertugas membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kekuasaan daerah, serta menjalankan tugas pembantuan yang diserahkan kepada kepala daerah.

c. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 105 Tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang-bidang yang ada di Disdalduk KB;
2. Membuat rencana strategis yang selaras dengan visi dan misi Walikota;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang yang ada di Disdalduk KB;
4. Memberikan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya;
5. Menyusun Sasaran Kerja Pengawas;
6. Menyelenggarakan kerjasama antara bidang-bidang yang ada di Disdalduk KB;
7. Menyelenggarakan fungsi kesekretariatan Disdalduk KB;
8. Menyelenggarakan program serta kegiatan bidang-bidang yang ada di Disdalduk KB;
9. Menyelenggarakan penilaian kinerja pegawai;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan bidang-bidang yang ada di Disdalduk KB;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Melaksanakan fungsi lain yang dilimpahkan Walikota sehubungan dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Bidang Pengendalian Penduduk

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan konsep pembangunan kependudukan;
- f. Pelaksanaan kegiatan perluasan jejaring kemitraan dalam pemaduan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan kegiatan analisa bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan analisa bahan integrasi isu kependudukan dalam perencanaan daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk

2.3.3 Bidang Keluarga Berencana

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data sasaran penerima dan pengolah alat dan obat kontrasepsi;
- f. Pelaksanaan kegiatan pelayanan prasarana dan sarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan koordinasi/hubungan kerja dengan instansi terkait untuk melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan penerima dan pemakai alat dan obat kontrasepsi;
- i. Pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta kb baru maupun aktif;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan layanan prasarana dan sarana pengendalian dan distrubusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi

2.3.4 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

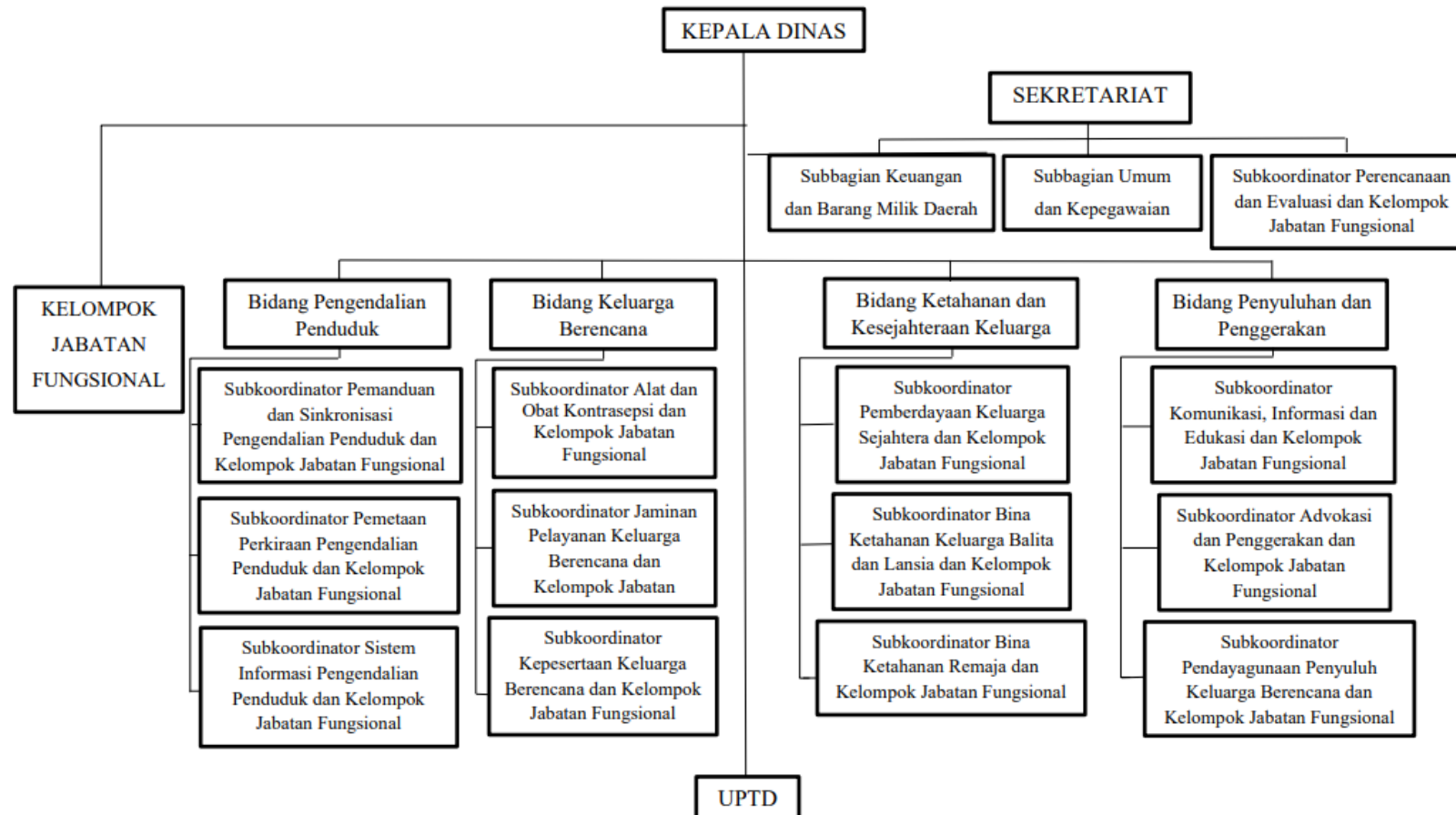
- e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kemitraan usaha, sumber permodalan, jaringan permodalan bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga;
- i. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pendampingan atau magang bagi para kader atau anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera

2.3.5 Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan konsep pembangunan kependudukan;

- f. Pelaksanaan kegiatan perluasan jejaring kemitraan dalam pemaduan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan kegiatan analisa bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan analisa bahan integrasi isu kependudukan dalam perencanaan daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk

2.3.6 Struktur Organisasi



Sumber : semarangkota.go.id